



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

CATATAN RAPAT

Tahun : 2025
Sidang : II
Masa Persidangan :
Rapat Ke :
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu/25 Juni 2025
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Blitar
Jalan A. Yani No. 19 Kota Blitar
Pimpinan Rapat : dr. Syahrul Alim
Acara : Penetapan Persetujuan Bersama atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar TA. 2024
Sekretaris Hadir : Dra. Eka Atikah (Sekretaris DPRD Kota Blitar)
Anggota DPRD Kota Blitar Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029
1. Fraksi PDI Perjuangan
Hadir 10 orang dari 10 orang anggota
1. dr.Syahrul Alim
2. Yudi Meira, S.T.
3. Johan Marihot
4. Siswanto, S.T
5. Aris Dedi Arman
6. Dedik Hendarwanto, S.T.
7. Sudarwati
8. Bayu Kurniawan
9. Tan Ngi Hing, S. Sos
10. Yohan Tri Waluyo - Ijin

Tidak Hadir :

-
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Hadir 5 orang dari 5 orang anggota
1. Ely Idayah Vitnawati
2. Drs. Abdus Sjakur
3. Adi Santoso, S.P
4. Totok Sugiarto
5. Judarso, SH

Tidak Hadir :

-
3. Fraksi Partai Golongan Karya
Hadir 3 orang dari 3 orang anggota
1. Mohamad Hardita Magdi, S.H.

2. Yasa Kurniawanto, Amd. Kep
3. Purwanto, S.Sos

Tidak Hadir :

-
- 4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Hadir 3 orang dari 3 orang anggota
- 1. Agus Zunaidi, SE
- 2. Guntur Pamungkas, S.M
- 3. H.Muh. Nuhan Eko Wahyudi, S.H.

Tidak Hadir :

-

5. Fraksi Partai Amanat Nasional
Hadir 3 orang dari 4 orang anggota
1. Muhamad Raihan Tsany Azurra
2. Adi Rianto
2. Eva Novianti
4. Rido Handoko, SPd

Tidak Hadir :

-

- C. Pemerintah
 1. Walikota Blitar
 2. Wakil Walikota Blitar
 3. Sekretaris Daerah Kota Blitar
 4. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesra
 5. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
 6. Staf Ahli
 7. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
 8. Camat se-Kota Blitar
- D. Undangan Yang Lain
 1. Kapolres Blitar Kota
 2. Ketua Pengadilan Negeri Blitar
 3. Komandan Batalyon Infanteri 511/DY
 4. KPU beserta komisioner KPU Kota Blitar
 5. BAWASLU beserta komisioner KPU Kota Blitar
 6. Tenaga Ahli Fraksi

PENDAHULUAN

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

Hadirin dimohon berdiri

Walikota Blitar, Wakil Walikota Blitar, Pimpinan DPRD Kota Blitar, Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan Anggota FORKOPIMDA Kota Blitar, memasuki Graha Paripurna Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

---(Menyanyikan Lagu Indonesia Raya)---

Hadirin disilakan duduk kembali

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakaatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

*Bapak ibu undangan yang kami hormati, beriring ucapan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima juli tahun dua ribu dua puluh lima kita dapat hadir bersama mengikuti rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kota blitar dengan agenda: “**Penetapan Persetujuan Bersama atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar TA. 2024**”*

Hadirin yang berbahagia,

Rapat paripurna pada pagi hari dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Blitar yang terhormat bapak dokter syahrul alim, kami silahkan.

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh,

Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Semoga Rahmat dari Allah subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya

Amin

Yth. Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kota Blitar ;

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Blitar

Yang saya Hormati :

- Rekan – rekan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Blitar atau yang mewakili
- Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau yang mewakili
- Komandan BATALYON INFANTERI 511 Blitar atau yang mewakili
- Ketua dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Kota Blitar
- Para Asisten, Sekretaris DPRD, Staf Ahli, serta seluruh pejabat dalam jajaran Pemerintah Kota Blitar yang hadir di Gedung Graha Paripurna.

Segala puji hanya milik Alloh Subhanahu Wata’ala, yang menganugerahkan Rahmat Dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam forum Rapat Paripurna hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Pimpinan Umat dan teladan kita, Nabi Muhammad Sholallohu ’Alaihiwassalam, Keluarga, Sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman serta memohon Syafaat-Nya di hari kiamat kelak. Aamin.

Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Saudara Walikota dan Wakil Walikota Blitar serta hadirin sekalian yang telah berkenan menghadiri undangan dan mengikuti Rapat Paripurna pada hari ini.

Pada Bulan Juni ini banyak event besar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar, dan saya memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan mulai dari Gerebeg Pancasila dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila, Selamatan Brokohan Hari Lahir Bung Karno, Soekarno Coffee Festival, Gala Senja Mustika Rasa, Selamatan Akbar Haul Bung Karno hingga Bazar Blitar Jadoel dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno ke-55, yang telah dilaksanakan dengan meriah, aman dan tertib.

Mengenang jasa Soekarno bukan sekadar mengingat masa lalu, tetapi juga menghargai dan meneruskan semangat perjuangannya dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila. Dalam era globalisasi ini, tantangan untuk mengamankan nilai-nilai Pancasila semakin besar. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berperan aktif dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebagaimana daftar hadir yang dilaporkan, dari 25 orang anggota dewan telah hadir 25 (dua puluh lima) orang. Dengan demikian berdasarkan Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar, kuorum telah terpenuhi dan Rapat Paripurna dapat dilaksanakan.

Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada hari ini Rabu tanggal 25 Juni 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

----Ketukan Palu 1x----

Sesuai dengan Agenda Rapat, mari kita simak Laporan Badan Anggaran DPRD tentang Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

- Kepada Juru Bicara Badan Anggaran, disilahkan.

YASSA KURNIAWANTO, Amd., Kep – Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Blitar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahi Walkhamdulillah Wasyukurillah Lahaula Walakuwata Illai Billahil'aliyyil Adzim

Yang Terhormat : Pimpinan Rapat, Ketua dan Wakil Ketua Serta para Anggota DPRD Kota Blitar

Yang Kami Hormati : Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar

Yang Kami Hormati

- Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Beserta Komandan Yonif 511 dan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, atau yang mewakili
- Sekretaris Daerah Kota Blitar
- Sekretaris DPRD, Para Asisten, Staf Ahli, Para Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, dan Camat Se- Kota Blitar,
- Serta Hadirin Para Undangan Yang Berbahagia

Segala Puji dan Syukur Bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Nikmat kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna :

"Penetapan Persetujuan Bersama Atas Raperda Kota Blitar Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024"

Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, dan kita berharap semoga termasuk di dalamnya. Amin.

Bapak/Ibu Hadirin Yang Kami Hormati,

Berikut disampaikan laporan hasil pembahasan Raperda Kota Blitar Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024

Angka Romawi Satu Pendahuluan , Terdiri Dari :

1.1. Latar Belakang

Dan Seterusnya

1.2. Dasar Hukum

Landasan penyusunan Laporan Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

DAN SETERUSNYA SAMPAI DENGAN NOMOR

15. Hasil Rapat Pembahasan Internal DPRD dan Pembahasan dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD Pemecahan masalah dan klarifikasi terhadap

Tanggapan TAPD atas DIM Badan Anggaran atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 /LHP BPK RI atas (LKPD) 2024.

**1.3. Maksud dan Tujuan
DAN SETERUSNYA**

1.4. Waktu dan Tempat Pembahasan

Pembahasan dilakukan melalui Rapat-rapat, baik melalui rapat intern maupun rapat kerja Badan Anggaran dan dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Blitar pada tanggal 10 Juni 2025 s/d 25 Juni 2025, sebagaimana Jadwal yang telah ditentukan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Blitar pada tanggal 5 Juni 2025 dengan agenda menyusun dan menetapkan Jadwal Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024

DAN SETERUSNYA

1.5. Pelaksana/Peserta Rapat

Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dilakukan oleh Badan Anggaran sebagai unsur dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sementara dari Pemerintah Kota Blitar dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berikut ini:

Badan Anggaran DPRD Kota Blitar dengan susunan sebagai

1. Sdr. dr. Syahrul Alim	: Ketua Badan Anggaran
2. Sdr. Adi Santoso , S.P	: Merangkap Anggota Wakil Ketua Badan Anggaran
3. Sdr. Mohamad Hardita Magdi,S.H	: merangkap Anggota Wakil Ketua Badan Anggaran
4. Sdri. Dra. Eka Atikah	: Sekretaris bukan Anggota
5. Sdr. Dedik Hendarwanto, S.T	: Anggota
6. Sdr. Yudi Meira, S.T	: Anggota
7. Sdr. Johan Marihot	: Anggota
8. Sdr. Yasa Kurniawanto, A.Md. Kep	: Anggota
9. Sdr. Yohan Tri Waluyo	: Anggota
10. Sdr. M. Raihan Tsany Azurra	: Anggota
11. Sdr. Agus Zunaidi , S.E	: Anggota
12. Sdri. Ely Idayah Vltnawati	: Anggota
13. Sdr. Totok Sugiarto	: Anggota

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan susunan sebagai berikut :

1. Priyo Suhartono, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Blitar sebagai Ketua
2. Drs. Tri Iman Prasetyono, M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar sebagai Wakil Ketua
3. Widodo Saptono Johannes, S.Sos,M.AB	Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sebagai Sekretaris
4. Drs. Tri Iman Prasetyono, M.Si. (sebagai Plt.)	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Setda Kota Blitar sebagai anggota
5. Mokhamad Sidik, S.Sos.,M.AP.	Asisten Pemerintahan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar sebagai anggota
6. Kusno, S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar sebagai anggota

7.	Ir. Erna Santi, M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai anggota
8.	Ika Hadi Wijaya S.H, M.H.	Ka. Bagian Hukum Setda Kota Blitar sebagai anggota
9.	Paring Genturutomo, S.STP, M.Si.	Ka. Bagian Organisasi Setda Kota Blitar sebagai anggota
10.	Ruli Tri Wibowo, S.STP., M.M	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Blitar sebagai anggota
11.	Munita Sandra, S.E.	Sekretaris BPKAD Kota Blitar sebagai anggota
12.	Fatmawati, S.E	Ka. Bid Perancanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Blitar sebagai anggota
13.	Zakiyah Darojat, S.T., M.T.	Ka. Bid Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur Bappeda Kota Blitar sebagai anggota
14.	Anang Setiawan, S. Sos	Ka. Bid Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Kota Blitar sebagai anggota
15.	Titik Indrawati, S.E	Ka. Bid Akuntasi BPKAD Kota Blitar sebagai anggota
18.	Nurul Muzaidah, S.H	Ka. Bid Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja BKPSDM sebagai anggota

DAN SETERUSNYA SAMPAI DENGAN

1.6. Sistematika Laporan
DAN SETERUSNYA

ANGKA ROMAWI DUA MATERI PEMBAHASAN

Surat Walikota Blitar Nomor: 900.1.1/1840/410.202/2025 tanggal 21 Mei 2025 perihal penyampaian Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan dilampiri Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar yang terdiri dari

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);
- 5) Laporan Arus Kas (LAK);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024

ANGKA ROMAWI TIGA MEKANISME PEMBAHASAN

Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dilakukan melalui rapat – rapat DPRD yang diselenggarakan atas undangan Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

ANGKA ROMAWI EMPAT HASIL PEMBAHASAN

Hasil Pembahasan melalui Rapat – Rapat Pembahasan Internal DPRD dan Pembahasan dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pemecahan masalah dan klarifikasi terhadap Tanggapan TAPD atas DIM Badan Anggaran Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 beserta lampiran sebagai dokumen pendukung dan Laporan Hasil Pemeriksaan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024

ANGKA ROMAWI LIMA CATATAN STRATEGIS

1. Berdasarkan Surat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 121/S-HP/XVIII.SBY/05/2025, tertanggal 2 Mei 2025, disampaikan Kepada Yth. Ketua DPRD Kota Blitar, Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2024, lampirkan 2(dua) buku 1. Laporan Nomor 61.A/LHP/XVIII.SBY/04/ 2025 dan 2. Laporan Nomor 61.B/LHP/XVIII.SBY/04/ 2025 masing masing pada tanggal 30 April 2025.

Pokok Pokok hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

- 1) Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 61.A/LHP/XVIII.SBY/04/2025 tanggal 30 April 2025.

- 2) Sistem Pengendalian intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagaimana disampaikan dalam Resume Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

DAN SETERUSNYA SAMPAI DENGAN NOMOR 61 (ENAM PULUH SATU)

61 Koreksi dan Penyempurnaan atas Bagian Konsiderans dan Batang Tubuh pada Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024

ANGKA ROMAWI ENAM REKOMENDASI

1. Keseluruhan muatan materi yang terdapat dalam Catatan Strategis DPRD Kota Blitar dalam dokumen Laporan ini beserta keseluruhan rekomendasi dalam dokumen ini merupakan satu rangkaian dari rekomendasi DPRD Kota Blitar atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini.
2. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjaga konsistensi terhadap ketepatan waktu pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penganggarannya sesuai tahapan yang telah diatur dalam ketentuan penyusunan RKPD, KUA PPAS , RKA SKPD dan APBD di setiap tahunnya harus dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
3. Pemerintah Kota Blitar diminta secara serta merta menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK RI dan segera menyampaikan kepada DPRD Kota Blitar seluruh progress tindaklanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2024
4. Dengan mempertimbangkan komitmen waktu yang menjadi perhatian kita bersama, dan atas kesepakatan rapat kerja Badan Anggaran untuk melaksanakan tindak lanjut tersebut tidak akan dibentuk Pansus / Panja lagi sehingga SKPD terkait supaya berkoordinasi dengan komisi yang menjadi mitra kerjanya masing-masing
5. Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 (lima belas) kali secara berturut-turut, menjadikannya Kota Blitar, satu - satunya daerah dengan perolehan WTP terbanyak secara berturut-turut di Jawa Timur sejak tahun 2005 s/d tahun 2024 dan semoga menjadi tradisi baik yang patut dijaga keberlanjutanya . Untuk itu Pemerintah Kota Blitar diminta secara konsisten melakukan upaya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Blitar setiap tahun secara konsisten dan berkelanjutan
6. Meskipun memperoleh opini WTP,

- Pemerintah Kota Blitar diminta tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP atas LKPD Tahun 2024
 - Pemerintah Kota Blitar diminta tetap melakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan performa kinerja pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Pemerintah Kota Blitar diharapkan dapat mempertahankan kualitas kebijakan agar antara perencanaan dengan penganggarannya tetap terjaga akurasinya sehingga kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah lebih baik lagi, dengan demikian untuk tahun realisasi APBD tahun 2025 yaitu saat ini (sebagai tahun tahapan awal implementasi RPJMD Kota Blitar yang baru periode 2025 - 2029) semakin lebih baik lagi dibanding tahun sebelumnya dan SiLPA tahun berjalan dapat pertahankan dalam batas yang wajar (dibawah 5% + 1 dari dana tersedia/terrealisasi).
8. Pemerintah Kota Blitar melalui TAPD Kota Blitar agar segera mempertimbangkan dinamika pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pasca Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 yaitu adanya suatu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA / Kebijakan Umum APBD TA 2025 berupa terjadinya perubahan sumber penerimaan dan penggunaan pembiayaan daerah. Bahwa Penerimaan Pembiayaan semula diproyeksikan sebesar Rp. 73.479.781.997,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) direncanakan berasal dari sisa lebih pembiayaan SiLPA 2024, namun dalam LRA 2024 SiLPA dimaksud hanya mencapai sebesar Rp. 53.450.843.127,59 (Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Serratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Lima Puluh Sembilan Sen) sehingga dalam kontruksi pembiayaan APBD 2025 terjadi kekurangan sebesar Rp. (20.028.938.869,41) (Dua Puluh Miliar Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Satu Sen)
9. Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan performa kinerjanya sebagai upaya untuk :
- meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada keseluruhan komponen PAD,
 - meningkatkan Pendapatan Daerah pada sector Dana Alokasi Khusus (DAK) ,
 - meningkatkan Pendapatan Daerah pada sector Insentif Fiskal (dulu Dana Insentif Daerah / DID) , dan meningkatkan Pendapatan Daerah berasal dari Pengalokasian Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan
10. Di tengah situasi penurunan / rendahnya capaian Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan (PAD dari RSUD Mardiwaluyo), direkomendasikan kepada Walikota Blitar agar segera melakukan evaluasi, selanjutnya segera mengambil langkah dan kebijakan strategis untuk mendukung fleksibilitas atas pelayanan yang disediakan oleh BLUD, berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan fleksibilitas yaitu Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda serta detail rincian objek yang diatur dalam Perkada dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi, tidak menghambat iklim investasi di daerah, dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Perkada yang mengatur mengenai penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang disediakan oleh BLUD disampaikan kepada Menkeu, Mendagri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perkada ditetapkan

11. Atas meningkatnya penyisihan piutang (macet tak tertagih) yang jumlahnya semakin besar setiap tahun, tentu patut memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah daerah, untuk itu DPRD Kota Blitar merekomendasikan agar Pemerintah melakukan upaya yang lebih serius dalam penyelesaiannya, melalui langkah taktis dan strategis (rencana aksi jangka pendek dan menengah) untuk penyelesaian berbagai piutang yang macet tersebut sampai dengan akhir RPJMD 2026 nanti. Sehingga untuk tahun-tahun berikutnya kondisi neraca daerah semakin sehat, dan pemerintah daerah segera dapat memanfaatkannya untuk dipergunakan dalam menambah belanja daerah membiayai pembangunan.
12. Pemerintah Daerah agar memberi perhatian khusus atas capaian target kinerja PAD pada Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based) utamanya hasil Capaian Kinerja keuangan pada penyertaan Modal Daerah pada Bank Kota Blitar, capaian kinerja realisasi pada lima tahun terakhir tidak memadai dan secara khusus meminta Walikota Blitar agar memerintahkan adanya audit dan pengawasan untuk tujuan tertentu terhadap Bank Kota Blitar
13. Terkait INSENTIF FISKAL
 - a. Pemerintah Daerah di minta untuk focus pada capaian / perolehan Penghargaan kepada daerah yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dalam pemberian insentif Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sebagaimana dimaksud tidak hanya mengejar se abreg status penghargaan yang hanya berisi pepesan kosong belaka. Seharusnya lakukan Optimalisasi Penghargaan berbasis kinerja ini dinilai berdasarkan peningkatan dan/atau capaian kinerja pemerintah daerah, jika suatu Daerah tidak memperoleh Insentif Fiskal berarti Daerah tersebut belum menunjukkan capaian kinerja terbaiknya. Mengingat Daerah, dapat memperoleh insentif fiskal dengan menunjukkan kinerja yang baik dalam berbagai bidang, termasuk tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional.
14. Agar program dan kegiatan yang berkaitan dengan indikator kinerja tahun 2024 yang gagal mencapai targetnya dilakukan evaluasi efektifitasnya, seperti program dan kegiatan untuk mencapai indicator:
 - Penurunan kemiskinan
 - Penurunan indeks gini
 - Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi
 - Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup
15. Pemerintah Daerah agar mencermati ketentuan tentang Penyaluran DAU berbasis kinerja, yaitu: Penyaluran DAU dengan memperhatikan kinerja laporan daerah, meliputi
 - pelaporan belanja pegawai dan realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya; dan
 - Penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan perencanaan belanja wajib (*mandatory spending*).
16. Larangan bagi Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan kebijakan pengalokasian belanja pegawai hanya diperuntukan pada gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), Kepala Daerah dan DPRD berdasarkan mandatory spending Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total Belanja APBD
17. Tidak diperkenankan belanja pada alokasi pos bantuan hibah dan bantuan sosial baik berupa uang maupun barang kecuali sudah masuk PERWALI CALON PENERIMA CALON LOKASI (CPCL)/ BY NAME BY ADDRESS

18. Program beasiswa Perguruan Tinggi Negeri / Swasta bagi keluarga tidak mampu berprestasi yang telah berjalan selama ini dan menjadi salah satu program unggulan Walikota agar mendapat perhatian lebih optimal lagi, sehingga tujuan pemberian beasiswa tersebut yang antara lain untuk mewujudkan 1 (satu) keluarga minimal 1 (satu) orang sarjana dapat terealisasi sampai dengan tahun 2030
19. Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi rujukan data yang akan mendapatkan perlindungan sosial sebagai basis data Kementerian Sosial dalam meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial
20. Dinas Sosial diminta untuk lebih maksimal dalam mengelola Data penerima Bansos dan melakukan verifikasi dan validasi dengan benar setiap 6 bulan sekali dan perlu dilakukan kunjungan lapangan atau sidak ke penerima Bansos oleh Dinas Sosial agar dapat diketahui ketepatan dalam penerimaan Bansos.
21. Perlu percepatan Revitalisasi Perusahaan Daerah ; BUMD PDAM Dan BPR Kota Blitar termasuk didalamnya pembenahan kelembagaan dan manajemen perusahaan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
22. DAN SETERUSNYA SAMPAI DENGAN NOMOR 74 (TUJUH PULUH EMPAT)

74. Pemerintah Kota Blitar agar segera mencari solusi permasalahan pembangunan berkaitan dengan Isue strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah , pengelolaan keuangan daerah dan Aset Daerah di Kota Blitar diantaranya :

1. Penanganan Pasar Tradisional / Pasar Rakyat ;
2. Peningkatan Kapasitas USAHA MIKRO; KOPERASI UMKM; IKM ; dan PKL
3. Penanganan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjaringan;
4. Optimalisasi Pengelolaan Makam Bung Karno , Ndalem Gebang dan Makam Aryo Blitar, beserta sarana prasarana pendukungnya ;
5. Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Kebon Rojo dan Kawasan Musium Peta
6. Optimalisasi Pengelolaan Stadion Suprijadi , Sport Center, Sirkuit Sentul, kawasan Aloon Aloon dan seluruh fasilitas Umum Pemerintah Daerah
7. Optimalisasi Pengelolaan Terminal Cargo di Tlumpu , Terminal Ngadirejo dan Terminal Patria
8. Penanganan dua PERUMDA : 1. TIRTA PATRIA dan 2.BANK KOTA BLITAR
9. Penanganan RSUD MARDIWALUYO
10. Optimalisasi Mall Pelayanan Publik
11. Revitalisasi dan optimalisasi pengelolaan Waterpark Sumber Udel ;
12. Penanganan Urusan Tata Ruang , Penataan Ruang beserta regulasinya;
13. Penanganan Leger Jalan dan masterplan jalan ;
14. Penanganan Penyerahan PSU beserta proses sertifikasinya
15. Pendataan , pengamanan Aset sebagai barang milik Daerah beserta regulasinya
16. Penanganan yang serius atas status hak atas tanah sejumlah 32 SUMBER MATA AIR di Kota Blitar sebagai bagian dari Sumber Daya Air Daerah namun keberadaan sudah menjadi Hak Milik Privat / Masyarakat
17. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah sebagai ASET DAERAH sehingga diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang .
18. Optimalisasi Aset Daerah sebagai sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya ;

termasuk diantara sebagai kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya Pemerintah Kota Blitar, meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya. seperti tanah dan sungai-sungai kecil (Kali) atau Barang Daerah dari hasil kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang didanai APBD, dari Hibah dan kegiatan perekonomian daerah lainnya. Seperti jalan, jembatan, Bangunan / Gedung kendaraan, dan barang modal lainnya.

19. Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai harta yang dipisahkan dan tidak dipisahkan mengacu pada dua cara pengelolaan aset daerah. Harta yang dipisahkan dikelola sebagai penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan hukum lainnya, sementara harta yang tidak dipisahkan dikelola langsung oleh pemerintah daerah, meliputi :

- Harta yang Dipisahkan merupakan aset daerah yang dialihkan kepemilikannya untuk dijadikan modal/saham/aset neto pada BUMD atau badan hukum lainnya. Dengan tujuan: Untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan mengembangkan perekonomian daerah, misalnya Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, koperasi, atau badan usaha lainnya. Pengelolaan: Dilakukan oleh pengelola badan usaha/hukum yang bersangkutan, dengan tetap diawasi oleh pemerintah daerah.
- Harta yang Tidak Dipisahkan merupakan aset daerah yang masih dikelola langsung oleh pemerintah daerah, tidak dialihkan kepemilikannya. Tujuan Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Seperti tanah, bangunan, kendaraan dinas, peralatan kantor, dan aset tetap lainnya yang digunakan untuk operasional pemerintahan daerah. Pengelolaan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

ANGKA ROMAWI TUJUH KESIMPULAN

1. Bahwa Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Walikota Blitar telah menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dimaksud kepada DPRD pada tanggal 21 Mei 2025 dan Penyampaian Nota Penjelasan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada Tanggal 5 Juni 2025, sebagaimana dimaksud telah tepat waktu , sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan .
2. Bahwa penyajian dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2024 dan LKPD Kota Blitar 2024 yang telah diperiksa BPK RI sudah di tindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Blitar, sebagaimana dimaksud diatas telah melalui proses koreksi, revisi dan penyempurnaan sehingga telah memenuhi syarat formal dan material sebagai bahan pertimbangan dalam persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD, persetujuan bersama dimaksud dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagaimana dimaksud pelaksanaannya telah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Rapat Paripurna, sebagaimana dimaksud telah tepat waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
3. Bahwa Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 beserta lampiran - lampirannya, berdasarkan bentuk dan susunan serta perangkaan telah memenuhi syarat formal dan material sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, oleh karena itu

setelah melalui persetujuan bersama Walikota Blitar dan DPRD Kota Blitar maka Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah memenuhi syarat formal dan material tersebut, dapatlah dilakukan penetapan dan mengundangkannya menjadi Peraturan Daerah setelah mendapatkan evaluasi oleh Gubernur dan pemberian nomor register-nya.

ANGKA ROMAWI DELAPAN PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Blitar dibuat, dengan harapan laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan DPRD Kota Blitar dalam menetapkan persetujuan bersama antara DPRD Kota Blitar dengan Walikota Blitar atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada tanggal 25 Juni 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar, Ketua dr. Syahrul Alim ditanda tangani, Sekretaris Dra. Eka Atikah ditandatangani. Pembacaan selesai.

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih atas penyampaian laporannya.

Selanjutnya, kita ikuti penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024. Kesempatan Pertama Kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, disilahkan

ELY IDAYAH VITNAWATI – Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Blitar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahi Walkhamdulillah Wasyukurillah Lahaula Walakuuwata Illabilhil adzim, Subha naka la ilma lana illa ma alam tana innaka antal alimul khakim.

Yang Terhormat : Pimpinan Rapat, Ketua dan para Wakil Ketua serta para Anggota DPRD Kota Blitar.

Yang kami hormati : Walikota Blitar
: Pejabat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah, Komandan Dandim, Kapolres Kota Blitar, Kepala kejaksaaan Negeri Blitar atau yang mewakili,
Komandan Batalyon Infanteri 511 Blitar dan Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau yang mewakili

Yang kami hormati : Sekretaris Daerah Kota Blitar , Para Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD Kota Blitar Para Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Camat dan Lurah serta UPTD Kesehatan , UPTD Pendidikan dan Kepala Sekolah se - Kota Blitar, serta
: Para Pimpinan partai - partai politik, Ormas dan LSM se- Kota Blitar dan rekan-rekan wartawan serta hadirin para undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan ini , kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Blitar untuk menyampaikan Pendapat Akhir fraksi terhadap RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 pada sidang paripurna yang terhormat ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sdr. Walikota Blitar yang telah menyampaikan jawaban terhadap PANDANGAN UMUM FRAKSI PKB ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 dalam sidang paripurna yang lalu.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BLITAR YANG TERHORMAT

Setelah mencermati tanggapan Sdr. Walikota Blitar terhadap Pandangan Umum Fraksi PKB atas RAPERDA PERTANGGUNGJAWAN APBD KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024, serta memperhatikan hasil pembahasan pembahasan baik ditingkat Fraksi, Komisi dan Badan Anggaran serta berdasarkan hasil indentifikasi potensi permasalahan pembangunan daerah serta assessment dan analisis Isu - isu strategisnya.

Maka dalam Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas RAPERDA PERTANGGUNGJAWAN PELAKSANAAN APBD KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024, disampaikan bahwa dalam iktiar dan upaya untuk mewujudkan kemasalatan umat dan kesejahteraan masyarakat, didasarkan pada ajaran para alim dan ulama, para guru dan para pemimpin bangsa : *Tasharruful Imam 'ala al ro'iyah manutun bil maslahah*, bahwa kebijakan dan tindakan seorang pemimpin harus selalu diarahkan untuk memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat yang dipimpinnya, Kaidah ini menekankan bahwa seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk membuat keputusan yang menguntungkan bagi rakyatnya, dan tindakannya harus selalu berorientasi pada kebaikan bersama

Didasarkan pada hal tersebut **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menyatakan “M E N Y E T U J U I”** ditetapkannya RAPERDA PERTANGGUNGJAWAN PELAKSANAAN APBD KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024, dengan beberapa CATATAN STRATEGIS DAN REKOMENDASI yang diuraikan berikut ini :

CATATAN STRATEGIS

Fraksi PKB memberikan apresiasi atas dua hal yaitu Capaian Opini WTP dan capaian Pemerintah Kota Blitar dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dalam LHP BPK RI tahun 2025

- 1) Capain 15 kali WTP secara berturut namun, meskipun memperoleh opini WTP 15 kali berturut , Pemerintah Kota Blitar diminta tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP atas LKPD Tahun 2024
- 2) Capain Tindak lanjut temuan dan Rekomendasi BPK RI atas LKPD Kota Blitar sejak tahun 2005 s/d 2024 sebanyak 862 Rekomendasi dan ditindaklanjut sebesar 778 atau 90, 26% sedangkan Target penyelesaian tindaklanjut dari total 39 rekomendasi BPK RI dari tahun 2020 s/d 2024 yang belum di selesaikan ditindaklanjuti dengan target 83% tercapai 85% atau 102,4%, adapun 30 Rekomendasi BPK pada LHP BPK RI Tahun 2025 atau LKPD 2024 by proses sampai dengan bulan Juni ini tercapai 65% menuju 100% s/d akhir tahun 2025

Catatan atas Laporan Realisasi Anggaran, untuk capaian kinerja realisasi Pendapatan Daerah Asli / PAD 2024 sebesar 96,68 % dari target Perubahan APBD TA 2024 sebesar Rp. 175.385.104.298,18 (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyaran Rupiah) dapat realisasi sebesar Rp.169.566.103.316,44 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah lebih) merupakan peroleh terendah kedua dalam kurun 10 tahun terakhir.

Namun demikian terdapat realisasi PAD yang mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu pada komponen Pajak Daerah dari target sebesar Rp. 49.606.982.952,82 (Empat puluh Sembilan Koma Enam Ratus Enam Juta Rupiah lebih) meningkat 109,22% atau realisasi sebesar Rp. 54.179.720.917,80 9,2% atau bertambah sebesar Rp. 4.572.737.964,98 atau naik 9,22%

Berbanding terbalik dengan PAD dari Retribusi Daerah pada Tahun 2024 Restribusi Daerah tidak dapat mencapai target hanya realisasi 90,91 % saja, diantaranya berasal Restribusi Jasa Umum RSD Mardiwaluyo , penurunan PAD Mardiwaluyo

telah mencetak Hat-trick, penurunan PAD MARDI WALUYO tersebut konsisten tiga tahun berturut turut, disamping itu penurunan PAD terjadi pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, bersumber dari divident Perumda Bank Kota Blitar dan faktanya lebih dari satu decade ini belum menunjukkan performa yang memadai, adapun Perumda Air Minum Tirta Patria sebagai BUMD atau perusahaan daerah senantiasa merugi sejak pendiriannya bisa dikatakan sebagai perusahaan yang merugi sepanjang masa seiring dengan usia Perumda itu sendiri. Berdasarkan assessment Fraksi PKB dapat disampaikan sebagai berikut ; bahwa PERMASALAH KRUSIAL YANG ADA DI KOTA BLITAR adalah LEMAHNYA PENGENDALIAN PEMERINTAH KOTA BLITAR terhadap pengelolaan BLUD Mardi Waluyo ; BUMD meliputi ; Perumda Bank Kota Blitar dan Perumda Air Minum Tirta Patria; Kerjasama Mitra BGS Blitar Town Square ; Water Park Sumber Udel, Rumah Potong Hewan (RPH) , pengendalian keseluruhan Pasar Rakyat, pengendalian atas pengelolaan Gedung – gedung Pemerintah termasuk diantaranya Gedung olahraga include diantaranya pengelolaan Stadion Suprijadi Blitar, Kawasan MBK dan PIPP, Kawasan Musium PETA, Kebon Rojo Ndalem Gebang, Terminal Patria, Balai uji kendaran dan Terminal Kargo serta Pengedalian atas asset Daerah sebagai barang milik daerah, baik sebagai harta yang dipisahkan dan tidak dipisahkan mengacu pada dua cara pengelolaan aset daerah. Harta yang dipisahkan dikelola sebagai penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan hukum lainnya, sementara harta yang tidak dipisahkan dikelola langsung oleh pemerintah daerah sedapatnya dioptimalkan pemanfaatan aset daerah tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan mengembangkan perekonomian daerah

REKOMENDASI

1. Pemerintah Daerah diminta secara serta merta menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK RI dan melakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan perfoma kinerja pengelolaan keuangan daerah , berdasarkan system pengendalian intern , ketataan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Blitar secara konsisten dan berkelanjutan
2. Pemerintah Daerah diminta lakukan Evaluasi atas capaian realisasi anggaran tahun 2024, diantaranya :
 - Evaluasi atas capaian realisasi PAD, mengingat PAD Tahun 2024 sebesar Rp.169.566.103.316,44 merupakan capaian PAD terendah kedua sejak 8 tahun terakhir
 - Evaluasi atas capaian realisasi PAD pada komponen restribusi pelayanan umum RSD Mardiwaluyo yang mengalami Trend penurunan sejak tahun 2022.
 - Evaluasi atas capaian target kinerja PAD pada Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based) utamanya hasil Capaian Kinerja keuangan pada penyertaan Modal Daerah pada Bank Kota Blitar
 - Evaluasi atas penurunan pendapatan dari Insentif fiskal (dulu DID) Proyeksi Pendapatan dari Insentif fiskal tahun 2025 sebesar RP. 0,00, sedangkan pada tahun 2024 memperoleh alokasi Rp.32,04M, turun nilainya dibanding tahun sebelumnya, dimana Kota Blitar pada tahun 2023 memperoleh alokasi Insentif fiskal sebesar Rp.53,43M. Hal tersebut menunjukan Kota Blitar belum memenuhi prasyarat sebagai Kota dengan kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, yang dialokasikan berdasarkan indicator kesejahteraan masyarakat, kriteria utama, dan kategori kinerja dengan Penilaian kategori kinerja dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap daerah, sebagaimana dimaksud dalam tujuan pemberian insentif fiskal dari pemerintah pusat kedaerah
3. Pertanggungjawaban SiLPA 2024.

Pemerintah Daerah diminta segera memformulasikan SiLPA tahun 2024 telah dilaporkan besarnya yaitu sebesar Rp.53.450.843.127,59 dan telah diaudit BPK, tersebut terdiri dari:

- a) Kas di Kas Daerah 48.741.546.208,83
- b) Kas di Bendahara Penerimaan 161.616,41
- c) Kas di BLUD-RSD Mardi Waluyo 3.290.670.779,31
- d) Kas di Kapitasi JKN 76.048.913,98
- e) Kas di Kas BOSNAS 1.158.477.680,06
- f) Kas di BOK Puskesmas 168.410.416,00
- g) Kas Lainnya 15.527.513,00

Jumlah SiLPA 2024 53.450.843.127,59

4. Walikota Blitar diminta segera memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ke dalam rancangan perubahan KUA PPAS Tahun 2025 berdasarkan perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Pelaksanaan APBD TA 2025, telah terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Tahun 2025 ; dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan : atau ADANYA SUATU PERKEMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI KUA, BERUPA TERJADINYA PERUBAHAN SUMBER PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN PEMBIAYAAN DAERAH
5. TAPD diminta segera mengkontruksikan deficit APBD TA 2025 sebesar Rp. (20,028,938,869.41), sebagaimana dalam LRA 2024 Penerimaan Pembiayaan TA 2025 semula di proyeksikan sebesar Rp. 73.479.781.997,00 direncanakan berasal dari sisa lebih pembiayaan SiLPA 2024 , namun dalam LRA 2024 SiLPA 2024 dimaksud hanya mencapai sebesar Rp. 53.450.843.127,59 sehingga dalam kontruksi pembiayaan APBD 2025 terjadi kekurangan sebesar Rp. (20,028,938,869.41),
6. Pemerintah Kota Blitar diminta untuk meningkatkan pengendalian atas :
 - 1) Pengelolaan Pasar Tradisional / Pasar Rakyat ;
 - 2) Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjaringan;
 - 3) Pengelolaan Makam Bung Karno , Ndalem Gebang dan Makam Aryo Blitar, beserta sarana prasarana pendukungnya ;
 - 4) Pengelolaan Kawasan Kebon Rojo dan Kawasan Musium Peta
 - 5) Pengelolaan Stadion Suprijadi , Sport Center, Sirkuit Sentul, kawasan Aloon Aloon dan seluruh fasilitas Umum Pemerintah Daerah
 - 6) Pengelolaan Terminal Cargo di Tlumpu , Terminal Ngadirejo dan Terminal Patria
 - 7) Pengelolaan dua PERUMDA : 1. TIRTA PATRIA dan 2.BANK KOTA BLITAR
 - 8) Pengelolaan dan Penanganan RSD MARDIWALUYO
 - 9) Pengelolaan Mall Pelayanan Publik
 - 10) pengelolaan Waterpark Sumber Udel ;
 - 11) Penanganan Penyerahan PSU beserta proses sertifikasinya
 - 12) Pendataan, pengamanan Aset sebagai barang milik Daerah beserta regulasinya
 - 13) Penanganan yang serius atas status hak atas tanah sejumlah 32 SUMBER MATA AIR di Kota Blitar sebagai bagian dari Sumber Daya Air Daerah namun keberadaan sudah menjadi Hak Milik Privat / Masyarakat
 - 14) pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah sebagai ASET DAERAH sehingga diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang .
 - 15) Pengelolaan Aset Daerah sebagai sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya ; termasuk

diantara sebagai kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya Pemerintah Kota Blitar, meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya. seperti tanah dan sungai-sungai kecil (Kali) atau Barang Daerah dari hasil kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang didanai APBD, dari Hibah dan kegiatan perekonomian daerah lainnya. Seperti jalan, jembatan, Bangunan / Gedung kendaraan, dan barang modal lainnya.

- 16) pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai harta yang dipisahkan dan tidak dipisahkan mengacu pada dua cara pengelolaan aset daerah. Harta yang dipisahkan dikelola sebagai penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan hukum lainnya, sementara harta yang tidak dipisahkan dikelola langsung oleh pemerintah daerah, meliputi :
- Harta yang Dipisahkan merupakan aset daerah yang dialihkan kepemilikannya untuk dijadikan modal/saham/aset neto pada BUMD atau badan hukum lainnya. Dengan tujuan: , misalnya Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, koperasi, atau badan usaha lainnya. Pengelolaan: Dilakukan oleh pengelola badan usaha/hukum yang bersangkutan, dengan tetap diawasi oleh pemerintah daerah.
 - Harta yang Tidak Dipisahkan merupakan aset daerah yang masih dikelola langsung oleh pemerintah daerah, tidak dialihkan kepemilikannya. Tujuan Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Seperti tanah, bangunan, kendaraan dinas, peralatan kantor, dan aset tetap lainnya yang digunakan untuk operasional pemerintahan daerah. Pengelolaan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024 disampaikan, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan dan atau penyempurnaan.

*Wallahu Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima Kasih.
Selanjutnya Kepada Fraksi Golongan Karya, disilahkan.

PURWANTO, S Sos – Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Blitar

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu,Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yth. Saudara Ketua, Para Wakil ketua dan Anggota DPRD Kota Blitar.

Yth. Saudara Walikota dan Wakil Walikota Blitar.

Yth. Saudara Sekretaris Daerah beserta jajarannya.

Yth. Para Pejabat TNI, Sipil, Polri ,dan Hadirin Sekalian.

Serta terhormat Rekan – Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta seluruh masyarakat Kota Blitar yang Kami banggakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT,karena Dialah yang memberikan karunia kepada kita kesehatan jasmani dan rohani,sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir berkumpul ditempat ini pada acara Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 . Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita sebagai pengikutnya dapat mengetahui mana jalan yang sesat dan mana jalan yang diridloai Allah SWT. Amin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Ijinkan kami dari Fraksi Golongan Karya menyampaikan Pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024, yang telah disampaikan oleh Walikota Blitar pada sidang paripurna tanggal 13 Juni 2025, bertempat di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar. Setelah mempelajari dan mencermati, pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 , maka ijinkanlah Fraksi Golongan Karya menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi dengan beberapa Rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu perhitungan yang lebih cermat lagi agar tidak terjadi Silva yang lebih banyak pada tahun Anggaran berikutnya.
2. Mendorong Pemerintah lebih berinovatif guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Peningkatan/perbaikan manajemen Rumah Sakit Mardi Waluyo agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi.
4. Predikat WTP harus dipertahankan,akan tetapi kualitas Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan agar kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat ditekan.
5. Temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan harus ditindaklanjuti dan diperbaiki guna memperkecil temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun-tahun berikutnya.
6. Pengelolaan pajak baik hotel, restoran, reklame, pajak bumi dan bangunan serta parkit harus ditingkatkan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar.
7. Pemanfaatan Aset-aset daerah harus ditingkatkan kemanfaatannya agar dapat meningkatkan nilai guna dan ekonomi yang lebih baik.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Berkenaan dengan Pendapat Akhir Fraksi Golongan Karya Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 **Fraksi Golongan Karya ”Menerima dan menyepakati Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 di Kota Blitar”**, agar dapat menjadi dasar dan landasan hukum yang jelas serta berkeadilan guna mempercepat pembangunan di Kota Blitar.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Golongan Karya Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 di Kota Blitar Akhir kata, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Alloh SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua, dalam mengemban tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima Kasih.

Selanjutnya Kepada Fraksi Persatuan Pembangunan, disilahkan.

GUNTUR PAMUNGKAS, SM – Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Blitar

Bismillahirohmanirohim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahi wakafaa, wassholatu wassalaamu 'alaa rosulihil musthofaa, wa'alaa aalihi wasohbihi wamanih tadaa, amma ba'du

Yang Terhormat : Saudara Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kota Blitar

Yang Kami Hormati : Saudara Walikota dan Wakil Walikota Blitar

Yang Kami Hormati : Saudara Plh. Sekretaris Daerah Kota Blitar

Yang Kami Hormati : Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Beserta Komandan Yonif 511 dan Ketua Pengadilan Negeri Blitar (atau yang mewakili)

Yang Kami Hormati : Sekretaris DPRD, Para Asisten, Staf Ahli, Tenaga Ahli Fraksi, Kepala Badan / Dinas / Bagian / Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Para Pejabat Sipil, TNI Dan Polri, serta rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik, para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur alhamdulillah, senantiasa kita haturkan kehadiran kehadirat Alloh Subhanu Wa Taala, atas segala limpahan Rahmat, Nikmat dan Taufiknya sehingga kita bisa hadir dalam Rapat Paripurna hari ini, dalam keadaan sehat wal afiat, dhohiron wa bathinan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan dengan mengharap Ridho dan pertolongan Nya pula, semoga amal perbuatan kita untuk senantiasa berbuat baik dan saling tolong menolong dalam kebaikan dengan saling ingat mengingatkan senantiasa mendapatkan maunah dan petunjuk dari Alloh SWT.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kehadiran Nabi Agung Rosulillah Muhammad SAW, pemberi sauri tauladan yang mulia, yang senantiasa adil dan bijaksana dalam mengambil tindakan dan keputusan. Semoga kita bisa mengikuti sunnah - sunnah nya !!!!... serta senantiasa mendapatkan syafaatnya. Aaamiin...

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk dapat membacakan Pendapat Akhir Fraksi Atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang kita bahas pada hari ini

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat Dan Hadirin Yang Berbahagia,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan penghargaan atas kinerja Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 15 kali berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Namun demikian, kami memandang bahwa capaian administratif ini harus disertai dengan perbaikan yang nyata dalam penerapan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu, dalam rapat paripurna kali ini, kami fraksi partai persatuan pembangunan terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 memberikan beberapa catatan strategis berikut:

1. Penanganan RSUD Mardi Waluyo

Fraksi PPP menaruh perhatian serius terhadap kondisi keuangan dan tata kelola RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang saat ini mengalami tekanan signifikan. Hasil audit BPK menunjukkan berbagai temuan yang belum ditindaklanjuti secara optimal, di antaranya terkait penatausahaan bahan kimia kedaluwarsa, pemberian honorarium dewan pengawas yang tidak sesuai ketentuan, dan ketidaktertiban dalam pengelolaan persediaan obat fast moving serta tanggungan hutang di tahun 2024 serta adanya permasalahan pada penyampaian laporan keuangan.

Selain itu, realisasi pendapatan RSUD yang tidak mencapai target turut memperdalam beban keuangan rumah sakit, sehingga berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat.

Untuk itu, fraksi PPP dengan tegas merekomendasikan:

- Agar RSUD Mardi Waluyo memperoleh tambahan anggaran secara maksimal yang bersumber dari kas daerah, baik melalui APBD perubahan tahun 2025 maupun skema pembiayaan lainnya yang sah, guna menutupi defisit operasional dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- Tambahan anggaran tersebut harus diarahkan secara terukur pada penguatan infrastruktur layanan, pemenuhan kebutuhan medis yang mendesak, penyediaan obat fast moving atau obat yang tingkat perputarannya sangat tinggi dan sangat dibutuhkan masyarakat serta pengembangan sistem manajemen keuangan rumah sakit yang akuntabel dan efisien.
- Pemerintah kota juga perlu melakukan reformasi tata kelola BLUD RSUD, termasuk pembenahan regulasi dan sistem pengawasan agar rumah sakit dapat menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal dan maksimal dan mandiri di masa mendatang.

Fraksi PPP menilai bahwa harus ada intervensi fiskal oleh pemerintah daerah pada sektor kesehatan utamanya RSUD Mardiwaluyo hal tersebut adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat Kota Blitar atas layanan dasar di sektor kesehatan yang pada tahun 2024 belum bisa dilaksanakan dengan baik serta belum sesuai harapan.

2. Kinerja OPD yang tidak mencapai target

Fraksi PPP mencatat bahwa masih terdapat ketidaktercapaian target kinerja anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik dari sisi pendapatan maupun realisasi belanja. Ini bisa dilihat dari belanja barang dan jasa yang hanya terserap sebesar 93,25%, (sembilan puluh tiga persen) dengan sisa anggaran lebih dari sebesar rp31 miliar. Disamping itu, belanja modal hanya terealisasi sebesar 92,27% (sembilan puluh dua persen) serta disertai adanya berbagai temuan ketidaksesuaian volume dan spesifikasi teknis pekerjaan.

Oleh karena itu, Fraksi PPP merekomendasikan:

- Dilakukannya evaluasi secara menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program OPD, terutama OPD penghasil PAD dan pelaksana program strategis pembangunan.
- Pemberian sanksi administratif maupun korektif kepada OPD yang tidak mencapai target, disertai pembinaan dan penguatan manajemen kinerja.
- Pemerintah kota perlu dimohon untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang lebih tepat sasaran dan terukur sehingga kesalahan tidak terulang di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya.

3. Perlindungan Tenaga Harian Lepas (THL)

Fraksi PPP menyoroti adanya permasalahan perlindungan terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, yang masih minim jaminan kerja dan rentan terhadap pemutusan kerja sepihak.

Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar:

- Pemerintah kota menyusun kebijakan perlindungan dan pendataan formal bagi seluruh THL, termasuk kejelasan status kerja dan evaluasi berbasis kinerja yang adil dan transparan.
- Dalam hal terdapat pemutusan hubungan kerja, harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan prinsip keadilan, bukan secara sepihak dan mendadak sebagaimana kasus yang terjadi di beberapa OPD.
- Perlu disusun mekanisme pengaduan dan advokasi internal bagi tenaga non-ASN agar dapat menyuarakan hak-haknya secara aman dan bermartabat.

4. Penataan toko modern berjejering

Fraksi PPP menyoroti maraknya toko modern berjejering yang tumbuh tidak terkendali dan berpotensi melanggar Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Untuk itu kami mendesak:

- Dilakukan audit dan evaluasi terhadap perizinan seluruh toko modern berjejering di wilayah Kota Blitar.
- Pemerintah kota menegakkan perda secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan UMKM dan pasar tradisional.
- Perlu disusun kebijakan baru atas zonasi dan pembatasan terhadap toko modern, agar pertumbuhan sektor ritel , UMKM, pedagang kecil tetap eksis dan terlindungi sehingga adanya toko modern dan berjejering tetap berimbang dan tidak mematikan ekonomi rakyat kecil.
- Memberikan sanksi kepada toko modern dan berjejering yang tidak mau mengakomodir produk -produk umkm lokal dalam item penjualannya.

5. Penertiban parkir liar, usulan parkir berlangganan, dan evaluasi krisis kepercayaan akibat video viral di PIPP

Fraksi PPP memandang bahwa pengelolaan sektor parkir dan retribusi wisata di kota blitar harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Blitar. Tidak hanya karena berhubungan langsung dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga karena berdampak terhadap citra kota dan kenyamanan masyarakat serta wisatawan. Hal ini bisa dilhat dengan masih adanya beberapa problematika yang timbul seperti :

A. Parkir liar di titik strategis

Masih banyaknya praktik – praktik parkir liar tanpa sistem retribusi resmi yang berada di kawasan masjid Ar Rahman, alun-alun, dan pusat keramaian lainnya akan berpotensi menimbulkan kebocoran PAD dan ketidaknyamanan public.

Terhadap hal tersebut , fraksi ppp mendorong:

- Penertiban menyeluruh terhadap praktik prasktik parkir liar;
- Pengangkatan dan pelatihan juru parkir liar sehingga menjadi bagian dari sistem resmi dishub;
- Penetapan zona parkir resmi berbasis kebutuhan dan potensi PAD.

B. Krisis kepercayaan pasca viral video tarif parkir Rp 800 ribu

Fraksi PPP mencermati dengan serius dampak dari viralnya video keluhan seorang ibu pengunjung wisata di PIPP – makam bung karno, yang menyebutkan dikenakan tarif parkir hingga Rp 800 ribu untuk tiga bus. Meski telah diklarifikasi oleh dinas pariwisata bahwa biaya tersebut adalah retribusi masuk kawasan wisata dan bukan murni tarif parkir, namun kerusakan persepsi publik telah terjadi.

Kami menilai situasi ini telah berdampak negatif terhadap:

- Jumlah kunjungan wisata ke Makam Bung Karno yang menjadi ikon sejarah kebanggaan Kota Blitar
- Pendapatan pelaku ekonomi lokal, seperti tukang becak dan pedagang kecil di sekitar kawasan PIPP, yang menyatakan bahwa adanya penurunan penghasilan drastis sejak video viral beredar.
- Oleh karena itu, Fraksi PPP mendorong pemerintah kota agar :
- Meningkatkan transparansi informasi tarif retribusi wisata dan parkir, baik melalui papan pengumuman yang jelas di lapangan maupun kanal digital resmi;
- Melakukan kampanye klarifikasi dan pemulihan citra wisata kota blitar secara intensif dan berkelanjutan;
- Menyusun ulang SOP pelayanan retribusi dan parkir agar tidak menimbulkan kesan pungutan liar atau ketidaksesuaian informasi di lapangan.

C. Usulan parkir berlangganan terintegrasi samsat

Sebagai solusi jangka panjang serta untuk mencegah kasus serupa dan guna menata sistem parkir dilakukan secara adil dan modern, Fraksi PPP mengusulkan agar diterapkan sistem parkir berlangganan tahunan, yang dibayarkan bersamaan dengan her-registrasi kendaraan di samsat.

Kami menilai skema ini akan :

1. Menjamin kontribusi secara resmi dari seluruh kendaraan bermotor terhadap peningkatan pad kota blitar ,
2. Mengurangi pungutan langsung di lapangan,
3. Memudahkan pengawasan dan meningkatkan kepastian hukum.

Oleh sebab itu , kami meminta pemerintah kota melakukan kajian lintas sektor serta menyiapkan landasan hukum daerah untuk mendukung implementasi sistem ini secara bertahap.

Fraksi PPP percaya bahwa jika pengelolaan sektor parkir dan retribusi wisata dilakukan dengan baik, maka akan mendorong pertumbuhan PAD, memperkuat citra pariwisata kota blitar, serta menciptakan ekosistem kota yang nyaman, tertib, dan berdaya saing di Kota Blitar

6. Rekomendasi umum

Kami mengapresiasi adanya realisasi pendapatan daerah sebesar 99,35% (sembilan puluh sembilan persen) dan belanja daerah 94,25% (sembilan puluh empat persen). Namun perlu di ingat , masih terdapat 39 temuan BPK yang belum ditindaklanjuti, yang juga harus menjadi fokus pemerintah kota untuk segera diselesaikan, Maka oleh sebab itu, Fraksi PPP juga mendorong:

- Optimalisasi pemanfaatan silpa tahun 2024 sebesar Rp 53,45 miliar untuk program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan , dan ekonomi kerakyatan.
- Peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja agar APBD tidak hanya terserap, tetapi berdampak nyata bagi masyarakat.

Penutup :

Dengan memperhatikan evaluasi dan catatan strategis serta rekomendasi di atas, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan beberapa catatan strategis agar segera di tindaklanjuti dan dilaksanakan oleh pemerintah kota blitar , yaitu :

1. RSUD Mardi Waluyo harus segera mendapatkan tambahan anggaran dari kas daerah;
2. OPD yang tidak mencapai target diberikan sanksi dan pembinaan;
3. THL diberikan perlindungan dan kepastian kerja;
4. Toko modern berjejering ditertibkan dan dikendalikan secara tegas;
5. Penataan retribusi parkir dilakukan secara baik dan tertib sehingga meningkatkan PAD, keamanan dan kenyamanan
6. Temuan BPK segera ditindaklanjuti secara akuntabel.

Sebagai penutup kami berharap “semoga Pemerintah Kota Blitar senantiasa menjaga amanah dan meningkatkan keberpihakan terhadap rakyat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan anggaran”

Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang kami sampaikan pada hari ini , dan dengan mengucap, *bismillahi tawakaltu 'alloh, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk segera di tetapkan.*

Sekian dari kami, mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan . Semoga Allah SWT. Selalu memberikan petunjuk dan pertolongan bagi kita semua. Aaamiin.... Yaa robba alamiin..

Akhiru kalam

Wallahul muwafiq ilaa aqwamith thoriq... wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima Kasih.

Selanjutnya Kepada Fraksi Partai Amanat Nasional, disilahkan.

ADI RANTO – Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Blitar

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang kami hormati:

Walikota dan Wakil Walikota Blitar

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kota Blitar

Hadirin yang berbahagia

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Blitar setelah mencermati dan menelaah

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024, menyampaikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah selama tahun anggaran berjalan.

Namun demikian, dalam semangat membangun transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, Fraksi PAN memandang perlu menyampaikan beberapa catatan penting sebagai wujud tanggung jawab konstitusional kami, demi mewujudkan Kutho Blitar Tambah SAE.

1. Sorotan terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Blitar

Fraksi PAN menyoroti persoalan yang masih berulang dalam pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan di Kota Blitar. Berdasarkan temuan di lapangan, kami menemukan masih banyak peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berasal dari luar wilayah administratif Kota Blitar namun masih tercatat dan didanai oleh APBD Kota Blitar. Hal ini tidak hanya menyalahi prinsip efisiensi anggaran, namun juga berpotensi menyebabkan kebocoran alokasi dana daerah. Permasalahan ini jelas melanggar asas tepat sasaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta melanggar ketentuan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang akurat dan berdasarkan basis data yang sah. Oleh karena itu, Fraksi PAN mendesak agar dilakukan verifikasi ulang data peserta PBI daerah yang didanai oleh APBD Kota Blitar dengan melibatkan Dinas Sosial, Disdukcapil, serta BPJS Kesehatan secara sinergis dan transparan. Pendataan ulang berbasis NIK serta integrasi dengan DTKS perlu segera dilakukan untuk mencegah pemberoran anggaran dan memastikan bahwa yang menerima manfaat adalah warga Kota Blitar yang berhak.

2. Catatan Strategis terhadap Pengelolaan Pasar Legi Kota Blitar

Pasar Legi Kota Blitar sebagai salah satu pusat ekonomi rakyat masih menunjukkan kecenderungan tingkat aktivitas yang rendah dan sepi pengunjung, berdasarkan pantauan langsung dan pengaduan dari masyarakat serta pedagang. Fraksi PAN melihat bahwa rendahnya intensitas aktivitas perdagangan di pasar ini tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti daya beli, namun juga oleh masalah internal struktural, terutama terkait ketimpangan kepemilikan lapak.

Kami menilai bahwa praktik monopoli lapak oleh segelintir individu (satu orang menguasai lebih dari satu lapak) telah mematikan kesempatan pelaku usaha kecil lainnya, serta menciptakan ketimpangan dan stagnasi pasar. Maka dari itu, Fraksi PAN mendorong Pemkot Blitar melalui Dinas Perdagangan untuk:

- Melakukan pendataan ulang dan penertiban kepemilikan lapak dengan prinsip satu pedagang satu lapak.

- Memberikan stimulus keringanan sewa bahkan penggratisan sementara lapak bagi pedagang baru maupun lama untuk meningkatkan gairah ekonomi dan perputaran modal mikro.
- Memberikan ruang usaha strategis bagi koperasi lokal seperti Koperasi Merah Putih yang membawa misi ekonomi kerakyatan berbasis potensi kelurahan di seluruh penjuru Kota Blitar.
- Mewujudkan inovasi program seperti "Affiliate Pasar Rakyat", yakni integrasi antara pasar tradisional dan pasar modern berbasis teknologi (e-commerce). Program ini memungkinkan pedagang tradisional dapat menjual barang dagangannya secara daring melalui platform yang dibangun oleh Pemda atau bekerja sama dengan marketplace lokal. Gambaran e-commerce yang dimaksud di antaranya adalah sistem katalog produk digital, sistem pembayaran QRIS, layanan antar lokal (kurir kelurahan), serta integrasi sistem POS (*Point of Sale*) berbasis aplikasi yang sederhana. Langkah ini tidak hanya mendigitalisasi pasar rakyat, namun juga memberdayakan UMKM secara berkelanjutan.

3. Penertiban Parkir Liar dan Reformasi Tata Kelola Perparkiran

Fraksi PAN menyadari bahwa persoalan parkir liar dan tidak tertib di sejumlah titik pusat keramaian seperti Jalan Merdeka, Kebonrojo, dan area pertokoan adalah warisan sistemik dari pemerintahan sebelumnya. "Blitar Kota Parkir" adalah istilah satir yang mencerminkan kompleksitas masalah yang ada, mulai dari lemahnya regulasi, lemahnya pengawasan lapangan, hingga praktik oknum juru parkir ilegal. Kami memahami bahwa Pemerintah Kota Blitar yang baru memerlukan waktu untuk menghimpun data secara menyeluruh, melakukan kajian mendalam, dan merumuskan langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif. Oleh karena itu, kami mendorong agar:

- Dinas Perhubungan Kota Blitar segera menyelesaikan pendataan ulang titik parkir resmi, dan menghapus titik-titik parkir yang tidak sesuai.
- Mengembangkan sistem parkir digital atau berbasis aplikasi untuk mengurangi kebocoran retribusi dan meningkatkan transparansi pendapatan daerah.
- Melibatkan Satpol PP dan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap parkir liar, serta membina juru parkir untuk beralih ke sistem yang legal dan profesional. Kami berharap penataan ini tidak sekadar represif, tetapi menjadi proses edukatif dan kolaboratif untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan di ruang publik Kota Blitar.

PENUTUP

Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan bahwa tiga sorotan di atas merupakan bagian dari kepedulian kami terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan menekankan integritas data, keadilan sosial, dan inovasi pelayanan, kami yakin bahwa Kota Blitar mampu menjawab tantangan zaman dan menjadi kota yang semakin maju, adil, dan manusiawi.

Fraksi PAN mendorong sinergitas antara eksekutif dan legislatif, antara Walikota dan DPRD Kota Blitar, untuk terus bekerja sama dengan semangat keterbukaan, keharmonisan, dan kesetaraan dalam berpolitik demi pembangunan yang inklusif. Seperti pepatah Jawa yang sering kami jadikan pengingat dan semangat: "*Kutho Blitar Tambah SAE*" — Kota Blitar harus terus dibangun agar menjadi lebih indah, lebih tertata, dan lebih menyejahterakan semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima Kasih.

Selanjutnya Kepada Fraksi PDI Perjuangan, disilahkan.

BAYU KURNIAWAN – Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Blitar

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarakatuh,
Selamat Malam dan Salam Sejahtera Bagi kita semuanya,

Sallom.....

Merdeka...!!!

Yth. Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kota Blitar

Yth. Sdr. Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar

Yth. Pejabat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah atau Yang Mewakili

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri dan Komandan Yonif 511 atau yang Mewakili

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli , Kepala Badan, Kepala Dinas. Kepala Bagian Dan Camat Se-Kota Blitar. Serta Segenap Hadirin Tamu undangan serta awak Media Baik cetak Maupun Elektronik.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat beserta hadirin yang berbahagia

Allhamdulillah Wasyukurilah Segala Puji Bagi Allah Subhanahu Wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Nikmat kepada kita semua, Sehingga kita masih diberi Kesempatan dan Kesehatan untuk dapat mengikuti Rapat Paripurna dengan Penuh Kebahagian.

Sidang paripurna yang kami hormati dan hadirin Yang Berbahagia

Dalam kesempatan pada hari ini , izinkan kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan Pendapat Fraksi PDI Perjuangan Terhadap Raperda Kota Blitar tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

Selamat kepada Atlet Take wondo sam Gensport Yang Mendapatkan Mendali Perak dan Perunggu, dan selamat berjuang kepada seluruh Kontingen

Ada Beberapa Catatan yang perlu Kami sampaikan :

1. Dalam Rangka Meningkatkan PAD Kota Blitar Diharapkan Pengelolaan Pajak dan Retribusi dapat di jalankan sesuai SOP. Kemudian secara berjenjang untuk dilakukan Monitoring dan evaluasi Guna mencegah Ketidak Taatan.
2. arkir Untuk dapat Dilakukan Perbaikan dalam Penglolaanya Guna Peningkatan Pendapatan Daerah.
3. Dalam Hal Kesehatan Perlu dilakukan Sebuah Perbaikan secara Menyeluruh Baik secara Administratif Maupun PelayananKesehatan Kepada masyarakat. Diharapkan Pemerintah Mampu Membuat Sebuah Strategi Guna Menangani Permasalahan dirumah Sakit Daerah. Dan Hal itu Bukan Hanya Sebuah Wacana Melainkan Realisasi Nyata.
4. Terkait Pendidikan, Masih ditemukannya Permasalahan dalam sistem penerimaan Siswa Baru yang mana hal tersebut dirasa perlu adanya sebuah perbaikan kedepan nya dan selain itu Untuk senantiasa memberikan prioritas anak warga kota blitar untuk bersekolah dikotanya. Dan Dengan adanya masa transisi atau penyesuaian Masa Pendaftaran Siswa diharapkan untuk senantiasa dilakukan pendampingan dan pengawasan agar semua siswa bisa mendapatkan tempat untuk belajar atau bersekolah.
5. Pada Kesempatan ini Kembali Kami sampaikan terkait keberadaan beberapa Pasar Yang Masih masih sepi dan kosong serta tidak berjualan sebagaimana mestinya. Maka diharapkan Pemerintah dapat Mencari solusi dalam menangani Permasalahan Hal tersebut.
6. Terkait Sarana dan Prasarana Olahraga Yang memerlukan Perhatian lebih serius, dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olah Raga hal itu guna Meningkatkan Produktivitas dan Potensi Bibit Atlet dikota Blitar.
7. Selanjutnya Terkait dengan Penerima Bantuan baik itu Rastrada, Bantuan Sosial untuk senantiasa di lakukan Update data
8. Dan Kedepan diharapkan Pemerintah Kota Blitar Melalui OPD Terkait untuk lebih inovasi dalam membuat dan merumuskan Program – program Tidak

Hanya Ceremonial saja melainkan juga mampu meningkatkan Kapasitas dan Ruang kerja bagi warga Masyarakat Kota Blitar.

Hadirin Rapat Paripurna Yang Berbahagia,

Demikian Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi PDI Perjuangan, Semoga yang telah Kami sampaikan Pada Paripurna Hari ini dapat Menjadi Bahan Masukan dan Pertimbangan dalam Melaksanakan Pemerintahan Kota Blitar Kedepannya.

Dengan Mengucapkan *Bissmillahhirohmannirohim* Kami **Fraksi PDI Perjuangan Menerima dan Menyetujui'** Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

Mohon Maaf jika ada Kesalahan atau kekurangan kami dalam menyampaikan Pendapat Fraksi ini. atas waktu dan kesempatan yang diberikan, kami ucapan Terimakasih. Salam sehat selalu untuk Kita Semua.

Merdeka....!!

*Wabbillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima Kasih

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian tadi telah kita simak Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran serta Pendapat Akhir Fraksi DPRD terkait Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya untuk memenuhi hak seluruh Anggota DPRD, maka saya tawarkan pada Forum Rapat Paripurna hari ini :

- Apakah Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 dapat disetujui?

---(Persetujuan secara aklamasi dari seluruh Anggota DPRD)---

- Terima Kasih

----Ketukan Palu 1x----

Hadirin undangan dan masyarakat yang mengikuti rilley Paripurna hari ini, sesuai dengan agenda, segera kita simak bersama Penyampaian Pendapat Akhir Walikota terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024

Kepada Saudara Walikota Blitar, disilahkan

Walikota Kota Blitar - H. SYAUQUL MUUHIBBIN, S.H.I

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua,
Yang Terhormat, Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kota Blitar,

Yang Saya Hormati, Rekan - Rekan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Blitar Beserta Komandan Yonif 511 dan Ketua Pengadilan Negeri Blitar (atau yang mewakili),

Yang Saya Hormati, Sdr. Plh. Sekretaris Daerah Kota Blitar,

Yang Saya Hormati, Sdr. Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Serta Camat Se-Kota Blitar, serta segenap hadirin, undangan, dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia,

Tiada kata yang lebih mulia selain ungkapan puji dan rasa syukur ke - hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'alaa*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan nikmat-nya, pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Kita juga perlu bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak bahwa rangkaian kegiatan peringatan Bulan Bung Karno, mulai dari peringatan Hari Lahir Pancasila, Brokohan Hari Lahir Bung Karno, Soekarno Coffe Fest, Bazaar Djadoel dan selametan akbar Haul Bung Karno berjalan dengan lancar dan sukses. Dihadiri banyak tokoh nasional dan regional mulai Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan banyak tokoh yang hadir di Kota Blitar. Rangkaian event besar ini merupakan wujud penghormatan yang tinggi kepada Bung Karno, sekaligus menggerakkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila ada kekurangan tentu akan menjadi catatan evaluasi bagi kami untuk disempurnakan pada pelaksanaan event - event selanjutnya.

Hadirin dan Undangan Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Alhamdulillah, seluruh proses mulai penganggaran, pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 terlaksana dengan baik. Pemerintah Kota Blitar selalu berupaya mentaati dan berpedoman pada aturan perundang- undangan yang berlaku, terutama tentang aturan pengelolaan keuangan daerah. dengan indikator,

Pemerintah Kota Blitar telah menerima Hasil Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024, dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI. Bahkan Pemerintah Kota Blitar merupakan satu satunya pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan predikat WTP yang ke-15 kali berturut turut. Prestasi ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Blitar bisa mempertahankan Predikat Opini WTP dengan konsisten.

Kita ketahui bersama, terkait dengan proses pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024, dapat berjalan dengan lancar dan berbagai permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Sehingga hari ini Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 dapat disetujui dan ditetapkan bersama.

Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Raperda hari ini adalah bagian dari upaya konkrit kita bersama untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang taat peraturan perundang- undangan, akuntabel, efisien, efektif dan transparan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024, yang telah kita setujui bersama merupakan bukti bahwa antara Pemerintah Kota Blitar dengan DPRD Kota Blitar adalah bukan sekedar mitra kerja, tetapi lebih dari itu merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang mempunyai peran sejarah dalam membangun masyarakat Kota Blitar. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Blitar mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada segenap Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat atas kerjasama mulai dari penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban, serta dengan segala kebijakan dan kearifannya telah memberikan persetujuan atas keputusan bersama Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun 2024.

Saran dan Rekomendasi, hasil evaluasi serta beberapa poin Penekanan penting yang telah diberikan DPRD Kota Blitar khususnya melalui Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi yang tadi telah disampaikan dan pada saat pembahasan Raperda ini, telah dan terus kami upayakan untuk ditindaklanjuti. Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan BPK, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, memperbaiki layanan publik, meningkatkan

kualitas dan kapasitas BUMD sebagaimana yang menjadi harapan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Kami berharap dengan ditetapkannya kesepakatan penting hari ini, akan berdampak meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Blitar, yang ermuara terhadap meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini juga harus kita gunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan pada tahun - tahun mendatang, agar hal – hal positif yang telah kita capai di masa lalu dapat kita pertahankan dan kita tingkatkan di masa – masa mendatang, sementara apabila ada kekurangan dapat segera kita perbaiki dan kita sempurnakan. Dengan harapan, permasalahan yang terjadi tahun ini, tidak terjadi berulang di obyek dan OPD yang sama pada tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini merupakan wujud konkret upaya kita dalam menjamin terlaksananya prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang selama ini memang terus kita upayakan dan kita laksanakan bersama di Kota Blitar.

Hadirin dan Undangan Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Pada kesempatan yang baik ini sekali lagi kami ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Unsur Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kota Blitar atas kerjasama dan sinergi yang terjalin selama masa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini. Seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan dengan lancar, sehingga Rancangan Peraturan Daerah Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 hari ini mendapatkan persetujuan bersama.

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya ke depan, kami terus mengharapkan adanya kerjasama yang semakin erat antara Pemerintah Dengan DPRD Kota Blitar. Jalinan kerjasama dan koordinasi Pemerintah dengan DPRD Kota Blitar diharapkan semakin harmonis sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran masing – masing.

Semoga segala upaya kita memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam mewujudkan Kota Blitar Baru, Kota Blitar Maju, menuju kota masa depan senantiasa mendapatkan petunjuk, bimbingan dan Ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'alaa. Sekian Terima Kasih.

*Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thariiq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih kepada Saudara Walikota Blitar.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Guna memenuhi ketentuan yang berlaku, akan dilaksanakan penandatanganan Persetujuan Bersama Atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024. Demi kelancaran acara, diminta bantuan Pembawa Acara untuk memandunya, disilahkan.

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

Hadirin Rapat Paripurna Yang Kami Hormati, berikut akan dilaksanakan penandatanganan Persetujuan Bersama Atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar tahun anggaran dua ribu dua puluh empat

Kepada Pimpinan DPRD Kota Blitar, Wali Kota Blitar, Wakil Wali Kota Blitar dan Plh Sekretaris Daerah Kota Blitar berkenan menempati tempat yang telah ditentukan

Hadirin dimohon berdiri

*Penandatanganan diawali oleh Ketua DPRD Kota Blitar, Bapak dokter Syahrul Alim
disilakan*

**---- Bapak dr, Syahrul Alim menandatangani Persetujuan Bersama Atas
Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun
Anggaran 2024----**

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

selanjutnya Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Bapak Adi Santoso Sarjana Pertanian
disilakan

**---- Bapak Adi Santoso, SP menandatangani Persetujuan Bersama Atas
Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun
Anggaran 2024----**

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

selanjutnya Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Bapak Muhamad Hardita Magdi, Sarjana
Hukum disilakan

**---- Bapak Muhamad Hardita Magdi, SH menandatangani Persetujuan Bersama
Atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar
Tahun Anggaran 2024----**

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

Selanjutnya berkenan Wali Kota Blitar
bapak haji Syauqul Muhibbin Sarjana Hukum Islam disilakan.

**---- Walikota Blitar menandatangani Persetujuan Bersama Atas Raperda
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran
2024----**

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

Dilanjutkan Penyerahan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kota Blitar tahun anggaran dua ribu dua puluh empat. Mohon izin foto bersama kami
pandu. Satu.....dua.....tiga.....

Penandatanganan dan penyerahan selesai terima kasih. Silakan kembali ke tempat

Hadirin disilakan duduk kembali

*Rapat paripurna akan dipimpin kembali oleh Ketua DPRD Kota Blitar
yang terhormat bapak dokter Syahrul Alim, disilahkan*

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih kepada Pembawa Acara.

Demikian tadi prosesi Penetapan Persetujuan Bersama Atas Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 dan
berdasarkan Pasal 11 Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Tata Tertib DPRD Kota Blitar, Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan
Walikota akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Untuk itu kepada Saudara
Walikota Blitar agar segera menyampaikan raperda tersebut kepada Gubernur Jawa
Timur untuk segera dievaluasi sebelum ditetapkan.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Alhamdulillah, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan sebagai rasa syukur Kehadirat Alloh Subhanahuwata'ala serta memohon Ridho-Nya marilah kita bersama-sama berdoa. Kepada Petugas Do'a, disilahkan.

Pejabat dari Kementerian Agama Kota Blitar – Bapak HABIBUR RAHMAN

Audzubillahiminasayaitonirojim

Bismillahirohmanirohim

Hamdas syakirin, hamdan na'imin hamdan yuwaff niamahu wa yukafiu mazidah.

Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghii lijalali wajhikal karimi wa 'adhimiwa adibi sulthanik Allahuma. Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad

Ya Allah... Ya Rahman.... Ya Rahim i

Tiada kata yang patut kami haturkan dengan rasa syukur yang tak terhingga atas kuasa dan izin - Mu, pada siang hari ini yang penuh rahmat ini kami dibawah naungan langitmu yang luas, kami berhimpun dalam sidang paripurna yang terhormat mengemban amanah rakyat menunaikan tugas negara.

Ya Allah....

Yang Maha membuka segala pintu kebaikan, bukanlah untuk kami pintu pintu hikmah dan kebaikan limpahkanlah kepada kami kejernihan hati dan ketajaman akal agar setiap keputusan yang kami ambil berpijak pada keadilan, bermuara pada kemaslahatan

Ya Allah...

Tuhan yang pengatur langit dan bumi, kami telah berusaha merancang melaksanakan dan mempertanggungjawabkan atas setiap anggaran yang engkau titipkan dalam APBD kami. Kami jadikan maka jadikanlah seluruh langkah kami sebagai bentuk pengabdian terbaik bagi Kota Blitar yang tercinta

Ya Allah... Tuhan Yang Maha Agung

Anugerahkanlah kepada para pemimpin kami kebijaksanaan kepada para wakil rakyat kami ke lapangan dada kepada masyarakat kami kesadaran dan kesabaran agar dapat membangun dengan harmoni dan menjaga persatuan menuju masa depan yang lebih baik lagi.

Ya Allah.... YaTuhan Kami....

Jadikanlah Kota Blitar Kota yang engkau Ridhai dan berkah dari langitnya dari buminya dari pemimpinnya hingga rakyatnya kokoh kan lah fondasi kejujuran tegakkanlah pilar keadilan curahkanlah rahmat-Mu di setiap sudut kehidupan kami

Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim watub alaina innaka antat tawwabur rahim

*Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina adzabannar
Wa shallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad
salam wa alhamdulillahi rabbil alamin*

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih kepada petugas do'a.

Dengan demikian acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar pada hari ini, saya nyatakan dengan resmi ditutup

----Ketukan Palu 3x----

Sekian terima kasih

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

Bapak ibu yang kami hormati dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selamat Siang

Wa as-salaamu wa alaikum warahmatullahi wa barakaatuh

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Badan Anggaran DPRD Kota Blitar telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun 2024. Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran agar menjadi perhatian bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah direncanakan, mencapai target.
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Faksi Golongan Karya, Fraksi Partai Persatuan Indonesia, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi PDI Perjuangan dalam Pandangan Akhir Fraksi **menerima dan menyetujui atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun 2024.**
3. Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh masing-masing fraksi agar segera ditindak lanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah
4. Telah dilaksanakan penandatangan Persetujuan Bersama Atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 antara Pimpinan DPRD Kota Blitar dengan Walikota Blitar

(Rapat ditutup pukul 11.00 WIB)

Sekretaris
DPRD Kota Blitar

Dra. EKA ATIKAH
NIP. 19680612 198803 2 006

DOKUMENTASI KEGIATAN





